

RENCANA AKSI DIVISI ADMINISTRASI TAHUN 2024  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PJ	BULAN																		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
<b>DIVISI ADMINISTRASI</b>																								
1	Evaluasi terhadap capaian kinerja tidak dilakukan seluruh satker secara periodik	Jan-Feb	Pendampingan Penyusunan LKjIP	1. LKjIP Kantor Wilayah tahun 2023 2. LKjIP UPT tahun 2023	1. Kanwil 2. UPT	B1	B2																	
2	Data pengembangan kompetensi Kemenkumham yang belum dilakukan secara keseluruhan	Jan-Feb	1. Pemutakhiran data 2023 indikator : (Data Kualifikasi Pendidikan, Data Kompetensi, Data Kinerja, Data Disiplin)	Laporan hasil pemutakhiran data 2023	1. Kanwil 2. UPT	B1	B2																	
		Jan-Feb	2. Pemetaan data 2025 (Data Kualifikasi Pendidikan, Data Kompetensi, Data Kinerja, Data Disiplin)	Laporan Pemetaan Data 2025	1. Kanwil 2. UPT	B1	B2																	
		Jan-Des	3. Implementasi Corporate University di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham minimal 25% pegawai pertriwulan (Januari s/d Desember)	Laporan triwulan implementasi Corporate University di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham	1. Kanwil 2. UPT	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12							
3	Belum optimalnya nilai Indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Penyerapan Anggaran sehingga berpengaruh terhadap capaian IKPA	Apr-Jun	1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Triwulan I TA 2024; 2. Tindaklanjut Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2024.	1. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Triwulan I TA 2024; 2. Surat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2024 kepada Kantor Wilayah.	1. Kanwil 2. UPT				B4	B5	B6													
		Jul-Sep	1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Semester I TA 2024; 2. Tindaklanjut Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Semester I TA 2024.	1. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Semester I TA 2024; 2. Surat Tindaklanjut Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Semester I TA 2024.	1. Kanwil 2. UPT								B7	B8	B9									
		Okt-Nov	1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Triwulan III TA 2024; 2. Tindaklanjut Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan III TA 2024.	1. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Triwulan III TA 2024; 2. Surat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan III TA 2024 kepada Kantor Wilayah.	1. Kanwil 2. UPT												B10	B11						
4	Satuan Kerja tidak menyampaikan usulan RKBMN	Jun-Jul	Kantor Wilayah melakukan pendampingan pra penyusunan RKBMN	Laporan Kegiatan Pra Penyusunan RKBMN	Kanwil						B6	B7												
5	Satuan Kerja belum menyampaikan Laporan Wasdal tepat waktu dan belum sesuai ketentuan	Jan & Jul	Menyusun Laporan Wasdal tingkat wilayah Semester II tahun 2023 dan Semester I tahun 2024	Laporan Wasdal tingkat wilayah Semester II tahun 2023 dan Semester I tahun 2024	Kanwil	B1							B7											
6	Belum optimalnya kualitas nilai pengawasan kearsipan internal dalam pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Jan	Membuat SK Tim Pengawasan	SK Tim Pengawasan Arsip Kantor Wilayah	Kanwil	B1																		
		Jan-Jun	Implementasi Pengawasan kearsipan internal sesuai dengan LKE	Laporan Implementasi Pengawasan kearsipan internal	Kanwil	B1	B2	B3	B4	B5	B6													
		Jul-Des	Monitoring dan evaluasi hasil dari pelaksanaan pengawasan kearsipan internal	Laporan monev dan rekomendasi hasil pengawasan kearsipan internal	Kanwil								B7	B8	B9	B10	B11	B12						
7	Penyelenggaraan Aplikasi Khusus di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM belum sesuai ketentuan pasal 36 dan pasal 39 Permenkumham	Feb-Apr	Melakukan pendataan aplikasi khusus di lingkungan Kanwil dan UPT melalui aplikasi SIMDATIN	Dokumen data aplikasi khusus di lingkungan Kanwil dan UPT	1. Kanwil 2. UPT		B2	B3	B4															
		Mar-Jun	Melaksanakan rekomendasi hasil verifikasi dan uji kelaikan keamanan oleh pusdatin	Dokumen perbaikan aplikasi	Kanwil			B3	B4	B5	B6													
8	Pengawasan atas capaian Prioritas Nasional (PN) belum optimal dibuktikan dengan belum optimalnya kegiatan pengawasan APIP pada setiap Prioritas Nasional Kemenkumham	Triwulan	Laporan Triwulan evaluasi pelaksanaan dari kanwil ke UKE I, UKE I ke Biro Perencanaan, Biro Perencanaan ke Itjen.	Outcome : Capaian Program Prioritas Kementerian Hukum dan HAM tepat sasaran dan berdampak pada masyarakat	Kanwil																			
		Triwulan	Evaluasi Triwulan oleh Itjen	Output/Data dukung dari Itjen :	Kanwil																			
		Triwulan	Penyampaian Laporan di minggu pertama setiap Triwulan	Laporan APIP hasil evaluasi capaian prioritas nasional di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Kanwil																			
9	Penerapan Integritas belum optimal dibuktikan dengan Indeks Integritas Kementerian Hukum dan HAM yang menurun berdasarkan hasil survei Penilaian Integritas KPK	Sepanjang tahun	Glorifikasi peningkatan integritas dan budaya anti korupsi Satker yang diputar setiap hari (Berupa rekaman tentang budaya integritas)	Outcome : Meningkatnya Budaya Integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang dibuktikan dengan perolehan indeks SPI yang meningkat dari tahun sebelumnya (berdasarkan penilaian KPK)	1. Kanwil 2. UPT	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12							
		Triwulan I	Tindaklanjut hasil SPI 2023			B1	B2	B3																
		Triwulan II	a. Penetapan responden eksternal dan internal yang tepat b. Sosialisasi kepada responden eksternal	Output/Data dukung dari Itjen: 1. Matriks tindaklanjut Hasil Penilaian Integritas (SPI-KPK) tahun 2023																				
		Triwulan III	Pelaksanaan survey oleh KPK	2. Laporan pelaksanaan penguatan/sosialisasi atas Survey Penilaian Integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2024																				
		Triwulan III	Hasil Survey	3. Laporan KPK tentang hasil SPI Kemenkumham tahun 2024																				

RENCANA AKSI DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2024  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PJ	BULAN																		
		DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
1	peningkatan Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam mengharmonisasikan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, DPRD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah	Jan	Menetapkan SK Tim Pembagian Kelompok Kerja dalam proses Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi dan SK Pembagian Wilayah Kerja(Zonas) Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan	SK Tim Pembagian Kelompok Kerja dalam proses Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi dan SK Pembagian Wilayah Kerja(Zonas) Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan	FPPHD	B1																		
		Feb	Melakukan Kegiatan Koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota dan Sekretariat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota	Laporan Kegiatan hasil koordinasi dengan melampirkan : a. dalam hal Kanwil menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi, data dukung berupa : undangan, daftar hadir, Notula, dan Dokumentasi; b. dalam hal Kanwil datang langsung ke Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota dan Sekretariat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, data dukung berupa : Surat tugas, Notula, dan Dokumentasi.	FPPHD	B2																		
		Mar-Nov	Mengharmonisasikan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dan Rancangan Kepala Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (memasukkan semua berkas ke dalam aplikasi SIPDDAH)	Laporan kegiatan yang melampirkan : a. dalam hal kegiatan Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi, data dukung berupa: RANPERDA 1) Surat Permohonan Pengharmonisasian; 2) Penjelasan/Keterangan; 3) Ranperda yang telah mendapatkan paraf persetujuan dari Sekda dan Pemrakarsa; 4) SK Tim Pembentukan Tim Penyusun Ranperda; 5) SK Pembentukan Propemperda beserta daftar lampiran Propemperda atau SK Keputusan bersama antara Kepala Daerah dengan ketua DPRD yang menyatakan pembentukan rancangan di luar Propemperda. RAPERKADA 1) Surat Permohonan Pengharmonisasian; 2) Penjelasan/Keterangan; 3) Raperkada yang telah mendapatkan paraf persetujuan dari Sekda dan Pemrakarsa; 4) SK Kepala Daerah Propemperkada; 5) SK Pembentukan Propemperda beserta daftar lampiran Propemperda atau SK Keputusan bersama antara Kepala Daerah dengan ketua DPRD yang menyatakan pembentukan rancangan di luar Propemperda. b. dalam hal kegiatan selain pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi, data dukung berupa Surat Tugas/ Daftar Hadir, Notula dan Dokumentasi.	FPPHD			B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11								
		Des	Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan pengharmonisasian Ranperda yang berasal dari Pemerintah	Laporan kegiatan pengharmonisasian Ranperda yang berasal dari Pemerintah Daerah, Ranperda yang berasal dari DPRD, dan Raperkada oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	FPPHD																			B12
2	Kurangnya pemahaman Masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pelaku Usaha terkait Bisnis dan HAM di Wilayah	Jan	Rapat Koordinasi terkait persiapan pembentukan Gugus Tugas Daerah (GTD) BHAM	Laporan hasil koordinasi persiapan pembentukan GTD BHAM	BID HAM	B1																		
		Feb	Rapat penyusunan draft SK GTD BHAM	Draft SK GTD BHAM	BID HAM	B2																		
		Mar	Penguohan GTD BHAM sesuai Perpres No.60 Tahun 2023	SK GTD BHAM sesuai Perpres No.60 Tahun 2023	BID HAM			B3																
		Apr	Rapat Kesekretariatan GTD BHAM	Laporan Rapat Kesekretariatan GTD BHAM	BID HAM			B4																
		Mei	Pelaksanaan Bimtek terkait Stranas Bisnis dan HAM	Laporan Bimtek terkait Stranas Bisnis dan HAM	BID HAM				B5															
		Jun	Pelaksanaan Bimtek terkait Stranas Bisnis dan HAM	Laporan Bimtek terkait Stranas Bisnis dan HAM	BID HAM					B6														
		Jul	1.a. Pelaksanaan Bimtek terkait Stranas Bisnis dan HAM 1.b. Pendampingan Pelaksanaan Uji Tuntas melalui Pengisian Aplikasi PRISMA	1.a. Laporan Bimtek terkait Stranas Bisnis dan HAM 1.b. Laporan Pendampingan	BID HAM							B7												
		Agst	1. Pelaksanaan Bimtek terkait Stranas Bisnis dan HAM 2. Pendampingan Pelaksanaan Uji Tuntas melalui Pengisian Aplikasi PRISMA	1. Laporan Bimtek terkait Stranas Bisnis dan HAM 2. Laporan Pendampingan	BID HAM								B8											
		Sep	1. Pelaksanaan Bimtek terkait Stranas Bisnis dan HAM 2. Pendampingan Pelaksanaan Uji Tuntas melalui Pengisian Aplikasi PRISMA 3. Pelaksanaan penanganan Pengaduan permasalahan BHAM	1. Laporan Bimtek terkait Stranas Bisnis dan HAM 2. Laporan Pendampingan 3. Laporan Pelaksanaan	BID HAM									B9										
		Okt	1. Monitoring dan Evaluasi Capaian Aksi dan Implementasi Pelaksanaan Stranas BHAM 2. Pelaksanaan penanganan pengaduan permasalahan BHAM	1. Laporan Monitoring Capaian Aksi dan Implementasi Bisnis dan HAM daerah 2. Laporan Pelaksanaan	BID HAM																			B10
		Nov	1. Evaluasi Capaian Aksi dan Implementasi Pelaksanaan Stranas BHAM Daerah 2. Pelaksanaan penanganan pengaduan permasalahan BHAM	1. Laporan Evaluasi Capaian Aksi dan Implementasi Bisnis dan HAM daerah 2. Laporan Pelaksanaan	BID HAM																			B11
		Des	1. Penyampaian laporan move dan tindaklanjuti Aksi serta Implementasi Pelaksanaan bisnis dan HAM Daerah 2. Evaluasi penanganan dugaan pelanggaran/ permasalahan BHAM	1. Laporan move dan tindaklanjuti serta Implementasi aksi bisnis dan HAM daerah 2. Laporan Evaluasi dugaan pelanggaran/ permasalahan BHAM	BID HAM																			B12
3	Belum adanya Dasar Hukum yang kuat, sehingga antusias/partisipasi Pemerintah Daerah kurang mendukung baik dalam sarana dan prasarana (tidak tersedianya anggaran khusus untuk melaksanakan kegiatan tersebut)	Mar	1. Rapat persiapan; 2. Surat Usulan penyampaian Desa/Kelurahan yang akan dijadikan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Binaan disetiap wilayah.	1. Surat Undangan Rapat (Undangan, Absensi, Notula, Gambar/Dokumentasi); 2. Surat Usulan Desa/Kelurahan Binaan dari masing-masing wilayah.	BPHN			B3																
		Jun	1. Pembentukan dan pembinaan kelompok Kadarkum di masing-masing wilayah; 2. Penyusunan SK Kelompok Kadarkum yang ditandatangani oleh Camat/Lurah/Kepala Desa; 3. Implementasi kuesioner indeks desa/kelurahan Sadar Hukum dalam Dimensi Akses Informasi Hukum.	1. SK kelompok Kadarkum yang ditandatangani oleh Camat/Lurah/kepala desa; 2. Laporan pembentukan dan pembinaan kelompok Kadarkum masing-masing wilayah (Undangan, Absensi, Notula, Gambar/Dokumentasi)	BPHN								B6											



7	Belum tersedianya pemutakhiran data Fidusia dalam rangka peningkatan Kualitas layanan Fidusia dan Jumlah Pendaftaran Fidusia	Mar-Nov	Penyebaran informasi terkait dengan kewajiban penghapusan jaminan fidusia yang telah selesai masa di wilayah	Laporan Penyebaran informasi terhadap terkait pendaftaran, perubahan penghapusan Jaminan Fidusia kepada masyarakat, notaris dan lembag a pembiayaan di wilayah	AHU			B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11		
8	Masih terdapat Ketidaksinronan data Notaris antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jan-Mar	Kantor Wilayah menghimpun data Notaris untuk dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, untuk kemudian dilakukan sinkronisasi dengan database Ditjen AHU	Laporan Hasil Konfirmasi Data Notaris antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	AHU	B1	B2	B3										
		Mei-Des	Implementasi Migrasi Data Notaris Desember	Database notaris yang telah sinkron antara Data Ditjen AHU dengan data yang tersedia di Kanwil	AHU					B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
9	Masih rendahnya pemahaman masyarakat atas Indikasi Geografis mengakibatkan rendahnya permohonan Indikasi Geografis	Mar	1. Koordinasi dengan pemerintah daerah (dinas terkait) memetakan potensi IG yang ada di wilayah; 2. Inventarisasi produk IG terdaftar yang ada di wilayah setempat; 3. Identifikasi Pihak — pihak yang terkait dengan Penguatan kelembagaan dan pengawasan Indikasi Geografis.	1. Laporan Koordinasi; 2. Daftar inventarisasi produk IG; 3. Daftar pihak-pihak terkait.	KI			B3										
		Ags	1. Sosialisasi dan pendampingan kepada pemohon, dinas atau pemda setempat terkait dengan produk yang akan diajukan atau sedang dalam proses; 2. Terbentuknya Pokja Penguatan kelembagaan dan pengawasan di daerah melalui SK yang ditandatangani oleh Kakanwil/ Gubernur; 3. Menyusun Pedoman dan Standar Pengawasan IG di Daerah dengan Berkoordinasi pemerintah daerah (dinas terkait), atau stakeholder terkait lainnya yang ada di daerah	1. Laporan Hasil Koordinasi; 2. SK Pokja per wilayah; 3. Dokumen Pedoman dan Standar Pengawasan IG.	KI							B8						
		Sep	Pengajuan permohonan Indikasi Geografis baru dan atau menyelesaikan minimal 1 permohonan permohonan yang masih dalam proses	Bukti permohonan pendaftaran Indikasi Geografis	KI										B9			
		Des	1. Berkoordinasi dengan pemda setempat terkait dengan potensi IG yang dapat diajukan permohonannya di tahun 2025 2. Tindak lanjut Pokja yang sudah terbentuk	1. Laporan Hasil Koordinasi dan daftar potensi IG tahun 2025; 2. Laporan Tindak Lanjut Pokja	KI													B12
10	Masih Rendahnya pemahaman masyarakat atas Merek Kolektif mengakibatkan rendahnya permohonan merek kolektif	Feb-Jun	Diseminasi Merek Kolektif	Pemahaman terkait merek kolektif	KI		B2	B3	B4	B5	B6							
		Jul-Nov	Pengajuan Permohonan Pendaftaran Merek Kolektif 1 wilayah 1 merek kolektif	Laporan dan Bukti Permohonan 1 Merek Kolektif	KI							B7	B8	B9	B10	B11		
		Des	Monitoring dan evaluasi	Laporan monev terhadap tindak lanjut di Tahun 2025	KI													B12
11	Persiapan kerja sanna kearah dengan target mitra kementerian dalam negeri, dan koneksi antara Bappenas dengan pemerintah daerah-->diarahkan untuk mendorong pendaftaran IG dari masing-masing daerah	Triwulan I-II	1) Persiapan penajakan dengan mitra forum Gugus Tugas IG; 2) Pembentukan Gugus Tugas Indikasi Geografis sebagai forum koordinasi antara stakeholder lintas Kementerian/ Lembaga/Pemda untuk mendorong pendaftaran IG dari wilayah	1. Tim Pusat: SK Bersama? SK Menkumham? 2. Tim Wilayah: SK Gubernur? SK Kakanwil?	KI			TW I		TW II								
		Triwulan I-III	1) Penyusunan Work Plan dari Gugus Tugas yang sudah terbentuk; 2) Sosialisasi dari poin Work Plan yang dibentuk (implementasi dari forum Gugus Tugas IG)	1) Dokumen Work Plan; 2) Laporan implementasi/sosialisasi.	KI			TW I		TW II		TW III						
		Triwulan IV	Monitoring dan Evaluasi	Laporan Monitoring dan Evaluasi	KI													TW IV
12	Permohonan paten dalam negeri yang masih rendah dibandingkan dengan total permohonan paten, sehingga memerlukan upaya untuk mendorong permohonan baru dalam negeri melalui pemanfaatan informasi penelusuran dokumen paten pada 33 provinsi	Jan-Feb	Koordinasi dan Pemetaan Calon Peserta	Laporan Koordinasi Laporan Calon Peserta Perlu Detail Informasi : - Kategori audiens, - Lokasi tempat, - Pembagian anggaran	KI	B1	B2											
		Mar-Ags	Pelaksanaan kegiatan Asistensi Teknis Permohonan dan Penelusuran Dokumen Paten	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Asistensi Teknis Permohonan dan Penelusuran Dokumen Paten	KI			B3	B4	B5	B6	B7	B8					
		Sep	Evaluasi Kegiatan dan Rencana Tindak Lanjut	Laporan Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut Kegiatan Asistensi Teknis Permohonan dan Penelusuran Dokumen Paten	KI									B9				
13	Persentase permohonan paten dalam negeri yang tidak bisa digrant yang tinggi, sehingga memerlukan upaya untuk pendampingan penyusunan dokumen permohonan paten yang baik dan benar kepada para calon pemohon paten (asistensi Drafting Paten)	Mar-Apr	Koordinasi dan Pemetaan Calon Peserta	Laporan Koordinasi Laporan Calon Peserta	KI			B3	B4									
		Mei-Okt	Pelaksanaan Kegiatan Asistensi Teknis Paten Draftin	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Asistensi Teknis Paten Drafting	KI					B5	B6	B7	B8	B9	B10			
		Nov	Evaluasi Kegiatan dan Rencana tindaklanjut	Laporan Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut Kegiatan Asistensi Teknis Paten Drafting	KI												B11	
14	Tren permohonan desain industri beberapa tahun terakhir mengalami stagnasi dan penurunan di dalam negeri, serta mulai munculnya beberapa permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan mekanisme perlindungan desain industri	Jan	B01 : - koordinasi dengan Stakeholder terkait - Membentuk Tim Inventarisasi Data Potensi Desain Industri SK Tim	B01 : - Laporan koordinasi - SK Tim	KI	B1												
		Feb	B02 : Koordinasi DJKI dan Kanwil Kumham secara virtual, dimana DJKI akan menyampaikan petunjuk pelaksanaan inventarisasi data potensi desain industri Laporan pertemuan virtual yang dilampiri dengan dokumentasi	Laporan pertemuan virtual yang dilampiri dengan dokumentasi	KI		B2											
		Mar	B03 : Melaksanakan rapat persiapan rencana aksi inventarisasi data potensi desain industri Laporan yang dilampiri notula rapat dan dokumentasi	B03 : Laporan yang dilampiri notula rapat dan dokumentasi	KI			B3										
		Apr-Mei	B04 — B05 : Melaksanakan koordinasi dengan pemangku kepentingan diwilayah masing-masing Laporan kordinasi yang dilampiri dokumentasi	B04 — B05 : Laporan kordinasi yang dilampiri dokumentasi	KI				B4	B5								
		Jun-Jul	B06 — B07 : Melaksanakan kegiatan inventarisasi potensi desain industri sektor industri kreatif Laporan kegiatan yang dilampiri dokumentasi	B06 — B07 : Laporan kegiatan yang dilampiri dokumentasi	KI						B6	B7						
		Ags-Sep	B08 — B09 : Melaksanakan kegiatan inventarisasi potensi desain industri sektor pendidikan Laporan kegiatan yang dilampiri dokumentasi	B08 — B09 : Laporan kegiatan yang dilampiri dokumentasi	KI								B8	B9				
		Okt	B10 : Melaksanakan kegiatan inventarisasi potensi desain industri sektor asosiasi pengusaha atau industri Laporan kegiatan yang dilampiri dokumentasi	B10 : Laporan kegiatan yang dilampiri dokumentasi Laporan Potensi Desain Industri di wilayah Target Peningkatan Jumlah Permohonan Paten Dalam Negeri 4.800 Permohonan Terpenuhi	KI												B10	
15	Kualitas Penataan regulasi yang belum merata dibuktikan dengan tingkat partisipasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penilaian IRH yang belum optimal	Jan-Feb	Sosialisasi Indeks Reformasi Hukum kepada Pemerintah Daerah	Laporan Sosialisasi Indeks Reformasi Hukum	BSK	B1	B2											
		Mar	Pembinaan dan Pendampingan Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah	Laporan Hasil Pembinaan dan Pendampingan Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah	BSK			B3										
		Apr-Ags	1. Monitoring pengunggahan data dukung dan verifikasi penilaian mandiri oleh Pemerintah Daerah pada aplikasi penilaian Indeks Reformasi Hukum 2. Verifikasi faktual dan validasi data dukung hasil penilaian mandiri Pemerintah Daerah	1. Laporan Hasil Monitoring pengunggahan data dukung dan verifikasi penilaian mandiri oleh Pemerintah Daerah 2. Laporan Hasil verifikasi faktual dan validasi data dukung hasil penilaian mandiri Pemerintah Daerah	BSK				B4	B5	B6	B7	B8					
		Nov-Des	Evaluasi pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum di Wilayah	Laporan Evaluasi pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum di Wilayah	BSK												B11	B12

RENCANA AKSI DIVISI PEMASYARAKATAN TAHUN 2024  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI	HASIL	PJ	BULAN															
					DIVISI PEMASYARAKATAN															
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Pemenuhan Hak Integrasi Warga Binaan Pemasyarakatan di wilayah	Januari	1) - Pemetaan kebutuhan PK dan APK pada Lapas dan Rutan.	1) -Laporan Pemetaan kebutuhan PK dan APK pada Lapas dan Rutan.	PAS	B01														
			2) Pembentukan Tim Pelaksana SPPT TI Wilayah Tahun 2024	2) SK Tim Pelaksana SPPT TI Wilayah Tahun 2024		B01														
			3) Pemetaan terhadap Lapas yang berpotensi menjadi lapas produktif	3) Laporan Pemetaan terhadap Lapas yang berpotensi menjadi lapas produktif.		B01														
		Februari	1) - Pemetaan kebutuhan PK dan APK pada Lapas dan Rutan.	1) -Laporan Pemetaan kebutuhan PK dan APK pada Lapas dan Rutan.	PAS		B02													
			2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan		B02														
			3) Penetapan terhadap Lapas yang berpotensi menjadi lapas produktif (piloting)	3) Laporan Penetapan terhadap Lapas yang berpotensi menjadi lapas produktif (piloting)		B02														
		Maret	1) -Sosialisasi terkait Penetapan wilayah piloting serta mekanisme dan sistem kerja PK dan APK pada Lapas/ Rutan	1) laporan Sosialisasi terkait Penetapan wilayah piloting serta mekanisme dan sistem kerja PK dan APK pada Lapas/ Rutan (piloting)	PAS			B03												
			2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan		B03														
			3) Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di UPT Piloting	3) Laporan Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di UPT Piloting;		B03														
		April	1) -Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan;	1) - Laporan Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan;	PAS				B04											
			2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan		B04														
			3) Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di wilayah	3) Laporan Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di wilayah ;		B04														
		Mei	1) -Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK yang mel di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan;	1) - Laporan Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan;	PAS					B05										
			- Sosialisasi hasil kajian dan urgensi pelaksanaan Litmas online serta pelaksanaan diskusi bersama pemangku kepentingan terkait.	- Laporan Sosialisasi hasil kajian dan urgensi pelaksanaan Litmas online serta pelaksanaan diskusi bersama pemangku kepentingan terkait		B05														
			2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan		B05														
		Juni	3) Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di wilayah	3) Laporan Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di wilayah ;	B05															
			1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi PK dan APK pada Lapas dan Rutan wilayah piloting.;	1) Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi PK dan APK pada Lapas dan Rutan wilayah piloting.	PAS					B06										
			2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan		B06														
		3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi;	3) Laporan Monitoring dan Evaluasi	B06																
		Juli	1) -Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan;	1) - Laporan Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan;	PAS							B07								
			2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan		B07														
			3) Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di wilayah;	3) Laporan Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di wilayah ;		B07														
		Agustus	1) -Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan;	1) - Laporan Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan;	PAS								B08							
			2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan		B08														
			3) Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di wilayah;	3) Laporan Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di wilayah;		B08														
		September	1) -Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan;	1) - Laporan Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan;	PAS									B09						
			- Sosialisasi SOP Litmas Online	- Laporan Sosialisasi SOP Litmas Online		B09														
			2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan		B09														
		Oktober	3) Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di wilayah;	3) Laporan Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di wilayah ;	B09															
			1) -Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan;	1) - Laporan Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan;	PAS											B10				
			- Sosialisasi SOP Litmas Online	- Laporan Sosialisasi SOP Litmas Online		B10														
		2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	B10																
		November	3) Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di wilayah;	3) Laporan Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di wilayah;	B10															
			1) -Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan;	1) -Laporan Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan;	PAS												B11			
			- Sosialisasi SOP Litmas Online	- Laporan Sosialisasi SOP Litmas Online		B11														
		2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	B11																
		Desember	3) Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di wilayah;	3) Laporan Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di wilayah	B11															
			1) Monitoring dan Evaluasi tugas dan fungsi PK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan;	1) Laporan Monitoring dan Evaluasi tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan.	PAS															B12
			2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan		B12														
		3) -Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi;	3) -Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi;	B12																

RENCANA AKSI DIVISI KEIMIGRASIAN TAHUN 2024  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PJ	BULAN														
		DIVISI IMIGRASI				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
20	Perluasan pelayanan e-Paspor di seluruh kantor imigrasi.	Januari - Maret	1. Rapat Persiapan Perluasan pelayanan e-paspor 2. Penetapan Kantor Imigrasi penerbit e-Paspor 3. Rapat Pembahasan Pengaturan Distribusi Blangko dan Kuota Penerbitan Paspor Biasa Elektronik pada Kantor Imigrasi 4. Sosialisasi Perluasan pelayanan e-paspor	1. Notula Rapat Persiapan 2. Penetapan Kantor Imigrasi penerbit e-Paspor 3. Notula Rapat Pembahasan 4. Laporan sosialisasi	DIVISI IMIGRASI			B03												
		April - Juni	Pemantauan Perluasan pelayanan e-paspor Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Laporan Pemantauan Perluasan pelayanan e-paspor Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia						B06										
		Juli - September	Pemantauan Perluasan pelayanan e-paspor Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Laporan Pemantauan Perluasan pelayanan e-paspor Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia									B09							
		Oktober - Desember	Pemantauan Perluasan pelayanan e-paspor Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Laporan Pemantauan Perluasan pelayanan e-paspor Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		DIVISI IMIGRASI														B12
21	Tingginya demand paspor belum dapat dilmbangi dengan kapasitas produksi	Januari- Maret	1. Melakukan pemetaan analisa kebutuhan pelayanan paspor dalam di unit satuan kerja 2. Penambahan kuota merujuk pada hasil pemetaan analisa kebutuhan	1. Peta analisa kebutuhan pelayanan paspor dalam di unit satuan kerja 2. Penambahan kuota merujuk pada hasil pemetaan analisa kebutuhan	DIVISI IMIGRASI			B03												
		April-Juni	Kegiatan Pembinaan Pengendalian Pengawasan Pelaksanaan TugasTeknis Peningkatan Penerbitan Paspor pada Kantor Imigrasi di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Laporan Kegiatan Pembinaan Pengendalian Pengawasan Pelaksanaan TugasTeknis Peningkatan Penerbitan Paspor pada Kantor Imigrasi di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia						B06										
		Juli- September	Kegiatan Pembinaan Pengendalian Pengawasan Pelaksanaan TugasTeknis Peningkatan Penerbitan Paspor pada Kantor Imigrasi di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Laporan Kegiatan Pembinaan Pengendalian Pengawasan Pelaksanaan TugasTeknis Peningkatan Penerbitan Paspor pada Kantor Imigrasi di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		DIVISI IMIGRASI								B09						
		Oktober - Desember	Kegiatan Pembinaan Pengendalian Pengawasan Pelaksanaan TugasTeknis Peningkatan Penerbitan Paspor pada Kantor Imigrasi di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Laporan Kegiatan Pembinaan Pengendalian Pengawasan Pelaksanaan TugasTeknis Peningkatan Penerbitan Paspor pada Kantor Imigrasi di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia															B12	
22	Meningkatnya kasus TPPO dan TPPM lintas negara	Januari- Desember	1. Meningkatkan kesadaran masyarakat ( <i>awareness</i> ) melalui pengayaan ( <i>enrichment</i> ) fungsi desa binaan imigrasi 2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait	1. Laporan Kegiatan 2. Laporan Koordinasi		Setiap Bulan														
23	Pengawasan dan penindakan keimigrasian belum optimal	Januari- Maret	1. Pengetatan target sasaran 2. Pengetatan pengendalian petugas	1. Laporan Pengetatan sasaran 2. Laporan Pengendalian Petugas	DIVISI IMIGRASI			B03												
		April-Juni	Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait	Laporan Koordinasi						B06										
		Juli- September	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung	Laporan Peningkatan sarana dan prasarana pendukung										B09						
		Oktober - Desember	Evaluasi pelaksanaan tugas	Laporan Evaluasi		DIVISI IMIGRASI													B12	



KEPALA KANTOR WILAYAH



Disahkan secara elektronik oleh :

BUDI ARGAP SITUNGKIR  
NIP.19751021 199803 1 001